



um
The Learning
University



Kliping Berita UM

Kompas 7 Juli 2017



Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Yudi Latif (kedua dari kanan) bersama (dari kiri) Deputi Bidang Pengajaran dan Materi UKP-PIP Anas Saidi, Deputi Bidang Advokasi UKP-PIP Hariyono, serta Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi Siberius Yoseph Soeharso berbicara kepada wartawan dalam konferensi pers sesuai pelantikan ketiga deputi tersebut di gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (5/7). UKP-PIP akan menjadi jembatan pemikiran tanpa prasangka.

Pancasila Titik Temu Bangsa

Yudi Latif Jamin UKP-PIP Tidak Jadi Alat Politik

JAKARTA, KOMPAS — Pancasila merupakan titik temu semua elemen yang menyatukan dan memperkuat bangsa Indonesia. Pancasila semestinya juga bisa menjadi bintang penuntun perjalanan arah bangsa sekaligus titik kritik pada kehidupan bernegara. Penerapan nilai-nilai Pancasila jangan sampai berjalan pragmatis.

Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) menjamin tidak akan menjadi alat kekuasaan dan akan bekerja sebagai jembatan bagi siapa pun tanpa prasangka negatif. UKP-PIP bertekad menjadikan Pancasila sebagai rumah bersama bagi banyak warga pandangan hidup bernegara.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala UKP-PIP Yudi Latif di kompleks Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (5/7), saat memaparkan program kerja kepada jurnalis.

"Karena itu, kalau tanpa penguatan Pancasila, kita kehilangan dasar kita berpolitik, tetapi juga disorientasi, kita tidak tahu bangsa ini diarahkan ke mana kalau ada masalah dalam kebangsaan kita. Sebenarnya merupakan kritik juga, Pancasila selama ini barangkali belum kita pahami, kita hayati, dan kita amalkan secara sungguh-sungguh," kata Yudi.

Yudi mengakui, pada era sebelumnya, Pancasila pernah menjadi alat untuk mengukuhkan rakyat. Pengalaman buruk masa lalu tersebut, ujarnya, kini tidak boleh terjadi lagi.

UKP-PIP dibentuk berdasar-

kan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 dan bertugas mengoordinasikan, mengendalikan, dan membenahi pengajaran Pancasila di sekolah-sekolah. Jika Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi kembali memberikan pelajaran Pancasila, UKP-PIP akan membantu merumuskan bahan ajar, sistem pengajaran, dan metodologi pembelajaran Pancasila (Kompas, 8/6).

UKP-PIP juga akan memberdayakan komunitas-komunitas di masyarakat untuk menumbuhkan nilai-nilai Pancasila. Simpul-simpul relawan komunitas itu yang akan menyosialisasikan pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam kesempatan tersebut, Yudi memperkenalkan tiga pejabat eselon I UKP-PIP yang baru dilantikannya. Mereka adalah Deputi Bidang Pengajaran dan Materi UKP-PIP Anas Saidi yang dikenal sebagai peneliti bidang filsafat, agama, dan sosiologi. "Belau punya koneksi yang kuat terhadap komunitas Muslim," kata Yudi.

Berkaryanya adalah Deputi Bidang Advokasi UKP-PIP Hari-

yono, yang sebelumnya menjabat Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Negeri Malang, Jawa Timur. "Saya kira beliau punya kompetensi dan relasi yang sangat luas dengan golongan kebangsaan," ujar Yudi.

Adapun Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi UKP-PIP dijabat Siberius Yoseph Soeharso, yang sebelumnya merupakan Kepala Pusat Studi Pancasila Universitas Pancasila, Jakarta. Menurut Yudi, Soeharso berpengalaman di sektor swasta, termasuk perbankan.

"Jadi, Pancasila juga memerlukan kerja sama dan peran serta komunitas untuk sama-sama merawat nilai-nilai, sebagai titik temu, titik pijak, dan titik tuju kita di masa yang akan datang," kata Yudi.

Audit regulasi

Soeharso mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi prioritas kerja tahun 2017-2018. Salah satu yang akan dilakukan adalah mengevaluasi regulasi yang ada untuk melihat sejauh mana konsistensinya dengan nilai-nilai Pancasila.

UKP-PIP juga akan menyusun alat ukur sejauh mana implementasi Pancasila diterapkan dalam setiap organisasi penyelenggara negara. Alat ukur yang disebut semacam indeks efektivitas penerapan nilai-nilai Pancasila itu diterapkan di semua lembaga penyelenggara negara.

"Kami akan mengukur, sejauh mana kerukunan umat beragama, toleransi, dan gotong royong berjalan dan berkembang di masyarakat," kata Soeharso. (NDY)